

PERENCANAAN KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HILISATARO NANDISA MENUJU DESA WISATA BERBASIS *SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT*.

Oleh:

Elok Perwirawati ¹⁾

Bantors Sihombing ²⁾

Prietsaweny Riris T Simamora ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

elokperwirawati@yahoo.com ¹⁾

bantors@gmail.com ²⁾

wenny.debataraja@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at assisting the village community of Hilisataro Nandisa plan tourism development in the village while at the same time fostering community participation in building and advancing their village towards a tourist village through the natural resources of the village. Through this tourism communication plan, a tourism development model design from the perspective of communication science will be produced to help the community in Hilisataro Nandisa village, not only market tourism products but also find the right form of communication so that synergy between village communities, village government stakeholders and local governments can be established with so that the development of the village towards a tourism village based on sustainable tourism can be realized. A qualitative approach was applied in this study to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject by describing it in the form of words and language. The results of the study indicate that to design tourism communication plans in empowering rural communities towards tourism villages, it must be designed and adapted to the South Nias Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Master Plan of South Nias Tourism Development for 2017-2025 so that the direction of tourism development in Hilisataro Nandisa village is towards tourist villages remain on the mission of regional tourism development and in line with the vision and mission of the village. In addition, all village problems related to regulation, coordination, distribution, research, personnel and training for village development towards tourism villages can be resolved with communication therapy.

Keywords: *Model, Tourism Communication, Empowerment, Village*

ABSTRAK

Tujuan dari riset ini adalah untuk membantu masyarakat desa Hilisataro Nandisa merencanakan pengembangan kepariwisataan di desa sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan desanya menuju desa wisata melalui sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut. Melalui perencanaan komunikasi pariwisata ini akan dihasilkan rancangan model pengembangan pariwisata dari perspektif ilmu komunikasi untuk membantu masyarakat di desa Hilisataro Nandisa, tidak hanya memasarkan produk wisata namun juga menemukan bentuk komunikasi yang tepat sehingga sinergitas antara masyarakat

desa, stakeholder pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik sehingga pengembangan desa menuju desa wisata berbasis pariwisata berkelanjutan dapat terealisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk merancang perencanaan komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat desa menuju desa wisata harus dirancang dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nias Selatan Tahun 2017-2025 agar arah pengembangan pariwisata di desa Hilisataro Nandisa menuju desa wisata tetap berada pada misi pembangunan kepariwisataan daerah dan sejalan dengan visi serta misi desa. Selain itu segala permasalahan desa terkait regulasi, kordinasi, distribusi, riset, tenaga dan pelatihan untuk pengembangan desa menuju desa wisata dapat diselesaikan dengan terapi komunikasi.

Kata Kunci : Model, Komunikasi Pariwisata, Pemberdayaan, Desa

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia konsisten dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan harapan mampu menjadi penyumbang salah satu devisa di Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mensukseskan pengembangan di sektor tersebut maka pemerintah harus mampu bersinergi dengan semua lapisan masyarakat dan juga para stakeholder. Salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan termasuk dalam hal pembangunan dan pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah dan masyarakat pada khususnya dipandang penting untuk menggali dan mengkaji setiap potensi wisata yang dimiliki daerahnya. Ketidaktahuan dan atau ketidakmampuan segenap elemen penyelenggara pembangunan atas potensi yang ada, menjadi salah satu titik lemah laju pembangunan di desa yang mengakibatkan rendahnya produktivitas masyarakat.

Ketika potensi wisata dan sumber daya sudah dimiliki oleh suatu daerah maka tahapan berikutnya adalah pengembangan dari kemampuan masyarakat itu sendiri yang harus di berdayakan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki

tujuan akhir yakni memandirikan masyarakat, memampuka dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambunga

Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*). Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan, tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) beserta kelembagaannya.

Desa Hilisataro Nandisa adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Kementerian Pariwisata (2011) menjelaskan bahwa kriteria dalam menentukan desa yang akan dijadikan desa wisata adalah memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal. Jika merujuk dari kriteria tersebut maka Desa Hilisataro berpotensi dijadikan desa wisata karena memiliki objek wisata alam berupa Air Terjun Gumbu Park dengan ketinggian 25 meter.

Saat ini objek wisata alam Gumbu Park dikelola seadanya oleh masyarakat desa dengan segala keterbatasannya. Mengingat banyaknya beban pemerintah dan

keterbatasan anggaran daerah tidak tepat rasanya jika hanya berharap dan mengandalkannya. Masyarakat desa sejak awal harus terlibat dan berpartisipasi aktif. Oleh karena itu riset tentang perencanaan komunikasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat di desa merasa perlu dilakukan agar dapat membantu masyarakat desa merencanakan pengembangan kepariwisataan di desa sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan desanya menjadi desa wisata melalui sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut. Melalui perencanaan komunikasi pariwisata ini akan dihasilkan rancangan model pengembangan pariwisata dari perspektif ilmu komunikasi untuk membantu masyarakat di desa Hilisataro Nandisa, tidak hanya memasarkan produk wisata namun juga menemukan bentuk komunikasi yang tepat sehingga sinergitas antara masyarakat desa, stakeholder pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik sehingga pengembangan desa menuju desa wisata berbasis pariwisata berkelanjutan dapat terealisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Komunikasi

Membahas perencanaan komunikasi maka terdapat dua konsep dasar yang berbeda yakni "Perencanaan" dan "Komunikasi". Perencanaan merupakan bagian dari aspek manajemen sedangkan konsep komunikasi akan dilihat sebagai suatu proses penyebaran dan pertukaran informasi. Meskipun kedua konsep ini menunjukkan perbedaan terutama dari kedua kajian yang berbeda. Namun kedua konsep ini dapat diintegrasikan menjadi satu kajian khusus dalam studi komunikasi dapat diaplikasikan dalam bidang penyebarluasan informasi, kesadaran masyarakat, pemasaran, penyelesaian krisis dan lainnya.

Menurut (Cangara, 2013: 41), perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi kegunaan dan fungsi

perencanaan komunikasi untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai baik kegiatan kampanye, penyuluhan, pencitraan, pemasaran social dan komersial, maupun untuk pembangunan infrastruktur komunikasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi merupakan sebuah dokumen tertulis yang berisikan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam mencapai tujuan. Program komunikasi itu untuk mengetahui kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, menggunakan alat apa dan memerlukan waktu berapa lama untuk mencapai semua itu, dan untuk mengetahui hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi. Hal ini berarti bahwa perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat krusial dan memiliki peran penting bagi kesuksesan organisasi atau Lembaga dalam mencapai tujuan.

Komunikasi Pariwisata

Kajian komunikasi pariwisata memiliki kedekatan biologis dengan kajian-kajian komunikasi dan pariwisata yang melahirkannya. Komunikasi menyumbangkan teori-teori komunikasi persuasif, teori komunikasi massa, teori komunikasi interpersonal dan kelompok. Sementara pariwisata menyumbangkan *field* kajian pemasaran. Komunikasi pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia dalam menyampaikan informasi tentang perjalanan ke suatu daerah atau objek wisata yang akan dikunjungi wisatawan dengan menikmati perjalanan dari suatu objek ke objek wisata lain sehingga wisatawan tertarik dan sampai pada suatu tindakan untuk mengunjungi (Bungin, 2015).

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pola pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. "Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi,

adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Sementara itu Adiyoso (2009) menegaskan bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Abu Huraerah, mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses memperkuat *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk menganalisis masalah yang dihadapi, pendampingan untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan, serta strategi untuk memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat (2008:87)

Model Pemberdayaan masyarakat menurut Dhamotharan (2009) diantaranya melalui pendekatan 7D yang dimulai dengan memberikan penghargaan terhadap potensi dan prestasi masyarakat serta nilai-nilai murni yang ada dalam masyarakat tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan mendorong mereka untuk menyadari ketersediaan sumberdaya yang mereka miliki serta menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka. Pendekatan 7D terdiri dari tahapan sistematis sebagai berikut: D1-*Developing relation* (Mengembangkan hubungan) D2-*Discovering capacities* (Menemukan kapasitas) D3-*Dreaming of community future* (Membangun cita-cita masyarakat) D4-*Directions of community actions* (Arah tindakan masyarakat) D5-*Designing community actions* (Merancang tindakan masyarakat) D6-*Delivering Planned Activities* (Melaksanakan kegiatan) D7-*Documenting Outputs, Outcomes and Learning* (Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari).

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)

Secara historis, paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk kritikan tajam yang ditujukan untuk paradigma konvensional pembangunan kepariwisataan yang telah muncul sebelumnya. Dalam paradigma konvensional orientasi pembangunan pariwisata memberikan prioritas tinggi

pada kepariwisataan massal yang mengedepankan perolehan devisa dan pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan dengan pihak pemerintah sebagai pemegang kendali yang dominan dalam tata kelola kepariwisataan sementara pembangunan pariwisata berkelanjutan lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi manfaat kepariwisataan bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan fisik dan non fisik pada destinasi wisata. Peran pemerintah dalam paradigma ini hanya sebagai fasilitator dan regulator dalam tata kelola kepariwisataan (Sunaryo, 2013:49-50)

Jadi, Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati terus hingga generasi yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan isu pelestarian lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan lainnya yang lebih luas. Hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai paradigma pembangunan terbaik, termasuk pembangunan kepariwisataan

Dalam buku panduan

pemberdayaan masyarakat desa wisata berbasis pendampingan yang dikeluarkan oleh Direktorat pengembangan SDM pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 dijelaskan bahwa konsep desa wisata berbasis pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada empat prinsip yakni :

1. Layak secara ekonomi maksudnya bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan dilaksanakan secara efisien untuk dapat memberikan nilai manfaat ekonomi baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Berwawasan lingkungan yang menekankan bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negative yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi.
3. Dapat diterima secara sosial yang menekankan bahwa proses pembangunan harus dapat diterima secara sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai, dan norma yang ada di lingkungan masyarakat dan memastikan bahwa dampak pembangunan tidak merusak tatanan tersebut.
4. Dapat diterapkan secara teknologi maksudnya dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber daya lokal serta mudah diadopsi oleh masyarakat setempat dengan mudah dan berorientasi jangka panjang.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Menurut Lexy J. Moelong (2010 : 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Pada penelitian ini akan dirumuskan sebuah rancangan model komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat desa Hilisataro menuju desa wisata yang berbasis *sustainable tourism development* berdasarkan masukan dan saran baik dari pemerintah desa setempat, masyarakat desa maupun stakeholder terkait yang diperoleh dalam penelitian untuk mendapatkan rancangan model komunikasi pariwisata yang tepat sehingga pemberdayaan kepada masyarakat desa ke depannya akan lebih maksimal.

Sampel dalam riset ini adalah orang-orang yang di pandang memahami situasi sosial dan kondisi desa Hilisataro tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Moelong (2010 : 224) purposive sample adalah menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Peneliti memutuskan untuk meneliti pemerintah desa, Lembaga desa, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Keolahragaan , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat desa Hilisataro Nandisa.

Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisa berdasarkan model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (Sugiyono; 2011 : 246). Terdapat tiga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Reduction (Reduksi Data), dimulai dengan membuat ringkasan, memberi kode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

- b. Data Display (Penyajian Data), Data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dengan demikian data tersebut memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
- c. *Conclusions* : Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi). Langkah ketiga menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Selatan (RIPPARKAB) Tahun 2017-2025.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Nias Selatan memiliki visi pembangunan kepariwisataan daerah yakni: "Terwujudnya Kabupaten Nias Selatan sebagai Destinasi Pariwisata, Budaya, Ekowisata Alam dan Bahari Berbasis Masyarakat, Berkelanjutan dan Bertaraf Internasional."

Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan juga telah menetapkan bahwa pembangunan pariwisata berdasarkan Ripparda mencakup dalam 4 aspek pembangunan yaitu :

- a. Destinasi pariwisata
- b. Industri Pariwisata
- c. Pemasaran pariwisata

d. Kelembagaan Kepariwisata
Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Selatan (RIPPARKAB) tahun 2017 - 2025 ditetapkan bahwa prinsip pembangunan kepariwisataan mengacu pada:

- a. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, budaya khas dan kearifan lokal nias selatan.
- b. Pemerataan pembangunan.
- c. Pembangunan berbasis sistem mitigasi bencana dan ramah lingkungan
- d. Pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Jika merujuk dari strategi pembangunan kepariwisataan, destinasi pariwisata di perkotaan pesisir Teluk Dalam, Lagundri, Sorake dan sekitarnya maka Kecamatan Toma merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata yang akan dikembangkan agar dapat berkelanjutan dan berdaya saing. Oleh karena itu sangat jelas bahwa pemerintah Kabupaten Nias Selatan sudah mengagendakan bahwa Kecamatan Toma merupakan kawasan strategis pariwisata yang harus dikembangkan.

Kecamatan Toma sendiri memiliki 14 desa yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yakni : Desa Bawoganowo, Desa Hili'alawa, Desa Hiliamaetaluo, Desa Hiliasi, Desa Hilimagari, Desa Hilinamoniha, Desa Hilindraso Raya, Desa Hilindrasoniha. Desa Hilisataro, Desa Hilisataro Eho Sofayo, Desa Hilisataro Gewa, Desa Hilisataro Nandisa, Desa Hilisataro Raya dan Desa Hilisoromi.

Sebagai desa hasil pemekaran, masyarakat Desa Hilisataro Nandisa memiliki harapan bahwa desa mereka dapat menjadi desa wisata sama seperti Desa Hilisataro Raya yang sudah lebih dahulu masuk dalam daftar 15 Desa Wisata Kabupaten Nias Selatan. Masyarakat optimis potensi wisata yang berada di desanya dapat dikembangkan secara optimal. Desa Hilisataro Nandisa memiliki Air terjun Gumbu atau yang lebih dikenal dengan Gumbu Park setinggi 25 Meter yang terbentuk secara alami dari sumber mata air berbentuk goa di dalam tanah yang berjarak tidak jauh dari lokasi air terjun tersebut. Keindahan dari potensi wisata desa Hilisataro Nandisa ini memang tidak diragukan lagi, mulai dari tiga tingkatan air terjun yang cukup unik, lokasi yang masih sangat alami dan asri serta

didukung dengan suasananya di sekitar air terjun tersebut yang identik dengan ketenangan.

Berdasarkan rencana pembangunan kawasan strategis pariwisata perkotaan pesisir Kabupaten Nias Selatan, terdapat dua tema yakni tema primer dan sekunder yang digunakan dalam pengembangan pariwisata. Tema primer adalah wisata perkotaan sedangkan sekunder adalah wisata olah raga dan bahari. Namun dalam pengembangan tema-tema tersebut Kecamatan Toma yang berada pada Pasal 25 point a tentang sasaran pembangunan tidak masuk dalam sasaran pembangunan kawasan yang mereka laksanakan baik dalam tema primer maupun dalam tema sekunder yang sudah ditetapkan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan juga ditemukan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di desa maupun di Kecamatan Toma khususnya desa Hilisataro Nandisa.

Pembangunan Pariwisata di Desa Hilisataro Nandisa.

Pembangunan pariwisata di Desa Hilisataro Nandisa sudah mulai dirintis sebagai desa wisata binaan LANAL Nias pada tahun 2019. Kegiatan di mulai dengan melaksanakan bersih – bersih di sekitar lingkungan obyek wisata, pemasangan sarana pendukung seperti penempatan tong sampah, plang lokasi dan penunjuk arah menuju lokasi Air Terjun Gumbu Park serta pembuatan jembatan di lokasi Air Terjun Gumbu Park. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Lokasi Wisata Air Terjun Gumbu Park Nias Selatan memiliki fasilitas yang baik dan bersih serta nyaman untuk dikunjungi wisatawan. Diharapkan dengan adanya perbaikan fasilitas ini, Wisata Air Terjun Gumbu Park dapat menjadi tujuan wisata favorit bagi pengunjung dan menjadi salah satu destinasi tujuan wisata di Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 1. Kegiatan kerja bakti oleh Lanal Nias



Sumber: redaksi maritimindonesia.co, 2019

Salah satu kendala yang dialami oleh Desa Hilisataro Nandisa dalam melakukan penataan aksesibilitas menuju lokasi wisata adalah adanya konflik internal berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang digunakan sebagai akses menuju lokasi wisata. Perlu diketahui bahwa destinasi Gumbu Park berada di antara tiga desa yakni Desa Hilisataro Nandisa, Desa Hilisataro raya dan Hilisataro Gewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Duha selaku Kepala Desa “Pemilik jalan yang menuju lokasi wisata dimiliki kurang lebih 5 kepala keluarga. Kemarin kasusnya itu kenapa tidak terbangun jalannya karena proyek yang untuk masuk pengaspalan disitu di hadang sama salah satu pemilik lahan, pemilik berkata supaya dia yang mengelola proyek itu kasusnya itu. Pemda sudah menghunjuk satu orang CV mengerjakan itu tapi pemilik lahan ini tidak mau, itu aja kemarin kendalanya.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Hatizifaulu Laia selaku Camat Toma bahwa:

“Menurut pemilik lahan, lebih baik tanah mereka dibiarkan kosong ditumbuhi ilalang daripada harus memberikan tanah tersebut untuk akses jalan menuju Gumbu Park, jika pemerintah daerah tidak memberikan proyek pengerjaan pengaspalan jalan tersebut kepada mereka. Dan konflik antar desa seperti ini tidak pertama kali terjadi di kecamatan toma. Belum lama ini juga ada konflik terkait pipa air yang melintasi halaman salah satu desa dan dipotong begitu saja

oleh desa tersebut karena dianggap bukan air untuk desa mereka.”

Konflik kepemilikan lahan membuat proses pembangunan aksesibilitas menuju destinasi Gumbu Park terhambat. Hal ini kemudian berdampak pada pemeliharaan objek wisata dan minimnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional ke objek wisata tersebut. Dalam pembangunan pariwisata dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua bentuk yakni: ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Oleh karena itu ketika konflik internal antar desa terkait pembangunan pariwisata terjadi maka dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan perangkat desa untuk secara bersama-sama mencari solusi terbaik agar konflik yang terjadi tidak menjadi faktor penghambat dalam pembangunan pariwisata di desa.

Komunikasi Pariwisata Dalam Pembangunan Pariwisata di Desa Hilisataro Nandisa

Komunikasi Pariwisata secara umum berhubungan dengan aspek komponen maupun elemen-elemen pariwisata. Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan komponen pariwisata ke dalam beberapa bagian penting seperti (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata dan (4) kelembagaan pariwisata (Bungin,2015:86). Namun dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan khususnya Desa Hilisataro Nandisa, komunikasi pariwisata dilakukan mencakup 4 aspek yang tercantum dalam RIPPARKAB Nias Selatan Tahun 2017-2025 yakni :

1. Pembangunan Destinasi.

Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa tersebut kemudian memasukkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Kabupaten Nias Selatan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Nias Selatan yang tertuang dalam pasal 16 ayat 2 namun belum melakukan sosialisasi baik terkait program desa wisata ataupun program pengembangan pariwisata lainnya.

Sehingga kebijakan aspek pembangunan destinasi yang tercantum dalam RIPPARKAB Pasal 14 belum di rasakan oleh masyarakat di Desa Hilisataro Nandisa. Masyarakat merasa tidak diberdayakan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengawasan. Salah satunya pada program desa wisata. Bapak Dedi Harita selaku pendamping desa menjelaskan bahwa:

“Ketika dikeluarkan daftar nama-nama itu (15 desa wisata di Kab. Nias Selatan) kami dari pihak pemerintahan desa justru kaget dan tidak tahu sama sekali kapan dan bagaimana kok bisa tiba-tiba ada daftar nama-nama desa wisata di nias selatan itu bisa keluar. Makanya ketika tadi ibu menyampaikan hal tersebut kami merasa tersinggung... Karena kami tidak tahu kapan ajang itu dibuat apa persyaratannya apa yang perlu dipersiapkan kami ga tau. Boleh tanya sama pak kades... saya sebagai pendamping desa justru tidak pernah tau program itu”.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada hubungan dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa Hilisataro Nandisa. Seharusnya setelah tahap identifikasi potensi desa dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat desa saling bersinergi untuk duduk bersama membangun destinasi. Hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah merupakan modal dasar kemajuan suatu daerah.

2. Pembangunan Industri Pariwisata

Desa Hilisataro Nandisa memiliki potensi ekowisata yang dapat dikembangkan secara maksimal. Pertama: Desa ini memiliki potensi wisata alam berupa air terjun Gumbu Park setinggi 25 Meter yang terbentuk secara alami dari sumber mata air berbentuk goa di dalam tanah yang berjarak tidak jauh dari lokasi air terjun tersebut. Objek

wisata ini masih sangat alami dan asri. Suasana di sekitar air terjun tersebut identik dengan ketenangan.

Gambar 2. Air Terjun Gumbu Park



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2022

Kedua: Desa Hilisataro Nandisa juga memiliki sumberdaya alam seperti Durian dan Pinang yang dapat dikelola menjadi produk wisata.

Gambar 3. Tim Peneliti Menikmati Durian Nias



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2022

Selain durian, desa ini juga dikenal sebagai desa penghasil pinang. Bagi masyarakat Nias, pinang menjadi salah satu bahan makanan yang disuguhkan kepada tamu-tamu kehormatan atau dalam pesta adat. Masyarakat Nias memiliki kebiasaan memakan siri-pinang yang disebut dengan *manafo*. *Manafo* dianggap

sebagai simbol budaya dan menjadi bagian dari acara-acara adat di Nias seperti acara penyambutan tamu kehormatan, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tamu lain dari luar daerah.

3. Pemasaran Pariwisata

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa destinasi pariwisata unggulan daerah. Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Secara Terpadu di Kabupaten Nias Selatan pada pasal 7, dijabarkan secara detail bahwa DPUD secara terpadu adalah kawasan wisata bahari, kawasan wisata alam, kawasan wisata situs megalith dan kawasan wisata cagar budaya.

Salah satu kecamatan yang masuk dalam Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Secara Terpadu di Kabupaten Nias Selatan adalah Kecamatan Toma sebagai Kawasan wisata bahari. Kecamatan Toma ditetapkan sebagai kawasan wisata bahari sebab di kecamatan tersebut terdapat Rockstar Beach sebagai salah satu spot surfing yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Namun sebenarnya tidak hanya wisata bahari saja yang dimiliki oleh kecamatan ini, terdapat juga wisata alam yang terletak di Desa Hilisataro Nandisa yakni Air Terjun Gumbu Park. Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan data bahwa kegiatan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah desa Hilisataro Nandisa masih sangat minim. Seperti yang disampaikan oleh pendamping desa, Bapak Dedi Harita bahwa

“kita pernah mempromosikan, meskipun tidak ada akun medsos resmi desa, tapi dari akun fb nya pak kades kita sering memposting ketika kita berkunjung ke tempat wisata di desa kita ini khususnya gumbu park. Namun masih belum terorganisir.

Minimnya kegiatan pemasaran pariwisata yang dilakukan juga terlihat dari hasil penelusuran melalui website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara (<http://disbudpar.sumutprov.go.id/>), destinasi wisata Kabupaten Nias Selatan

yang ditampilkan dalam *website* tersebut hanya pantai sorake sementara destinasi wisata lainnya belum ditampilkan. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat *website* adalah teknologi informasi terbaik saat ini sebagai sarana pertukaran informasi yang dapat diakses dengan mudah secara gampang, cepat, dan tanpa batas jarak ataupun waktu.

4. Kelembagaan Pariwisata

Dalam menyelenggarakan pembangunan, desa mendayagunakan lembaga- lembaga desa untuk membantu pelaksanaan mulai dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Hilisataro Nandisa sudah memiliki beberapa kelembagaan desa antara lain pemerintahan desa, BPD, LKMD, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Simpan Pinjam, Poskesdes dan Bumdes, Namun dari beberapa kelembagaan desa tersebut belum terdapat kelembagaan pariwisata yang khusus untuk mengelola destinasi wisata seperti kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis) yang bertanggung jawab secara penuh dalam pengelolaan objek wisata Gumbu Park. Sementara Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang ada di Desa Hilisataro Nandisa lebih memilih fokus pada bidang usaha di luar dari sektor pariwisata.

Dari pembahasan diatas, kelemahan komunikasi pariwisata terjadi dalam hal pemasaran destinasi dan kelembagaan desa. Untuk itu dibutuhkan konsep perencanaan komunikasi agar 4 aspek pembangunan pariwisata yang diharapkan oleh Kabupaten Nias Selatan maupun masyarakat desa Hilisarao Nandisa dapat terealisasikan.

Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan komunikasi untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Hilisataro Nandisa menuju desa wisata adalah:

a. Regulasi:

Regulasi terkait pembangunan pariwisata perkecamatan sudah melibatkan Kecamatan Toma seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 tahun 2018 pasal 16 ayat 2 namun dalam peraturan daerah tersebut Pasal 25 Ayat e & f Kecamatan Toma tidak dimasukan baik dalam tema primer maupun tema sekunder. Tema primer adalah wisata perkotaan sementara tema sekunder adalah wisata olahraga bahari. Pada tahun 2021, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.16_105 tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Nias Selatan memasukan salah satu desa dari 14 desa di Kecamatan Toma sebagai desa wisata. Dalam hal regulasi Desa Hilisataro Nandisa belum mengetahui bahwa desa yang berbatasan dengan mereka sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa merasa terabaikan. Seyogyanya regulasi dibuat harus mampu mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Setiap regulasi harus ada sosialisasi agar setiap desa dan masyarakat tumbuh tingkat pemahamannya baik tentang manfaat maupun tujuan dari regulasi tersebut.

b. Kebijakan Nasional:

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) yang dirancang oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nias Selatan merupakan turunan dari kebijakan nasional yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri oleh karena itu sebaiknya dalam mengimplementasikannya harus bersinergi dengan kedinasan lain di Kabupaten seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan lain sebagainya sebab beberapa kebijakan saling berkaitan. Misalnya terdapat kerjasama antar daerah yang harus diselesaikan dengan duduk bersama. Salah satunya adalah permasalahan antar desa. Dalam hal ini, kasus legalitas destinasi air terjun Gumbu Park yang harus diselesaikan secara kekeluargaan.

c. Kordinasi:

Kordinasi antara kabupaten dan kecamatan sangat dibutuhkan dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kabupaten dan kecamatan harus dapat menjadi fasilitator yang berperan memfasilitasi masyarakat desa dalam setiap proses, tahapan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan desa seperti pengembangan pariwisata desa. Terkadang masyarakat menyadari bahwa desa mereka memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Namun, mereka tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal pengelolanya. Disinilah peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Terdapat fakta bahwa masyarakat desa Hilisataro Nandisa menyadari bahwa desa mereka memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan namun masyarakat desa merasa diabaikan dan tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedi Harita selaku pendamping desa bahwa:

"Masyarakat desa tidak pernah mendapat sosialisasi tentang desa wisata dari Dinas Pariwisata Nias Selatan, kalau kita bisa bilang kita ini seperti anak yang tidak diakui. Mereka tidak pernah secara khusus memberikan perhatian kepada potensi wisata desa kami, tidak pernah mensosialisasikan gerakan sadar wisata juga, pokoknya tidak pernah. Titik."

Jadi masalah kordinasi menjadi salah satu penyebab dari terhambatnya pengembangan dan pembangunan pariwisata di desa.

d. Distribusi.

Distribusi atau penyebaran informasi di era digital saat ini kian mudah, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu yang menghalanginya. Kemudahan ini seyogyanya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama dalam hal penyebaran informasi terkait program pembangunan baik yang berasal dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Begitu juga masyarakat desa Hilisataro Nandisa yang seharusnya dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya adalah informasi tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2017-2025 dan tentang program-program yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nias Selatan seperti program desa wisata. Namun dalam hasil wawancara didapatkan data bahwa pendistribusian informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat desa Hilisataro Nandisa belum merata sampai ke masyarakat desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedi Harita bahwa:

"Ketika dikeluarkan daftar nama-nama itu (15 desa wisata di Kab. Nias Selatan) kami dari pihak pemerintahan desa justru kaget dan tidak tahu sama sekali kapan dan bagaimana kok bisa tiba-tiba ada daftar nama-nama desa wisata di nias selatan itu bisa keluar. Makanya ketika tadi ibu menyampaikan hal tersebut kami merasa tersinggung..... Karena kami tidak tahu kapan ajang itu dibuat apa persyaratannya apa yang perlu dipersiapkan kami ga tau. Boleh tanya sama pak kades.....saya sebagai pendamping desa justru tidak pernah tau program itu".

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa sinergitas penyebaran informasi bersama antara pemerintah daerah,kecamatan dengan desa belum terjalin secara maksimal sehingga menimbulkan dugaan diskriminasi sosial di masyarakat

e. Riset.

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian terkait dengan perencanaan komunikasi pariwisata belum ada dilakukan di desa tersebut dan juga di Kecamatan Toma. Hasil riset ini nantinya akan menjadi kajian untuk kepentingan evaluasi dan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan perencanaan sebuah program.

f. Tenaga dan Pelatihan

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa belum ada kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Hilisataro Nandisa. Hal tersebut dikarenakan memang belum ada pelatihan yang diberikan oleh dinas terkait khusus untuk masyarakat yang berada di desa Hilisataro Nandisa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, Bapak Duha bahwa *“tidak pernah. Meskipun kami pernah mendengar bahwa pemandu wisata ada di nias selatan. Kadernya ada di hilisataro, hanya saja ke hilisataro nandisa nya belum pernah ada pelatihan dan lainnya”*.

Masalah sumber daya manusia dalam bidang pariwisata menjadi krusial jika tidak adanya pendampingan dari dinas terkait terutama bagi masyarakat desa yang memiliki potensi wisata artinya ketika potensi wisata sudah dimiliki namun sumber daya manusianya tidak memiliki kompetensi maka mustahil potensi tersebut bisa dikembangkan secara maksimal.

Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa Menuju Desa Wisata Berbasis Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, Desa Hilisataro Nandisa belum ditetapkan sebagai desa wisata oleh Bupati Nias Selatan melalui Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.16_105 Tahun 2021. Hal ini kemudian menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah Desa Hilisataro Nandisa untuk menjadikan desa mereka menjadi desa wisata. Harapan tersebut tertuang dalam Visi Misi RPJM-desa tahun 2021-2026. Agar visi misi desa dapat terwujud maka dalam proses pembangunannya harus merujuk pada empat prinsip pembangunan.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa masyarakat desa Hilisataro Nandisa ingin dilibatkan dalam hal perencanaan komunikasi pariwisata dimulai dari pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut Dhamotaran (2009) diantaranya dapat

diketahui melalui pendekatan 7D yang dimulai dengan memberikan penghargaan terhadap potensi dan prestasi masyarakat serta nilai-nilai murni yang ada dalam masyarakat tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan mendorong mereka untuk menyadari ketersediaan sumberdaya yang mereka miliki serta menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka. Pendekatan 7 D terdiri dari tahapan sistematis sebagai berikut :

Developing Relations (Mengembangkan Hubungan)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, pada tahap ini pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan belum secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Hilisataro Nandisa untuk menggali, membina serta mengembangkan desa tersebut.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nias Selatan hanya mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa tersebut kemudian memasukannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Kabupaten Nias Selatan yang tertuang dalam pasal 16 ayat 2 namun Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nias Selatan belum melakukan sosialisasi baik terkait program desa wisata ataupun program pengembangan pariwisata lainnya kepada masyarakat desa Hilisataro Nandisa.

Discovering Capacities (Menemukan Kapasitas)

Pada tahap ini masyarakat Desa Hilisataro Nandisa menyadari bahwa desa mereka memiliki obyek menarik berupa alam dan makanan lokal yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk dijadikan desa wisata. Munculnya kesadaran masyarakat

untuk menjadikan desa mereka sebagai desa wisata dikarenakan masyarakat menyadari bahwa akan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas hidup diantaranya mampu menciptakan peluang kegiatan dan usaha baru. Hal ini kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang ikut serta menjadi pelaku dalam kegiatan di desa secara langsung memberi tambahan pendapatan.

Pengelolaan sederhana yang masyarakat desa lakukan lainnya adalah dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerja bakti di lokasi wisata, membuat jembatan penyeberangan dari kayu dan juga membuat ayunan namun masyarakat desa ini belum secara maksimal dibantu oleh pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memberikam bimbingan atau pelatihan tentang kompetensi sehingga pengembangan potensi wisata di desa tersebut hanya jalan ditempat.

Dreaming of Community Future (Membangun cita-cita masyarakat)

Pada tahap ini masyarakat desa didorong untuk menyatakan cita-cita mereka tentang gambaran kreatif masa depan desa yang positif setelah memiliki cita-cita tersebut mereka kemudian dapat mengembangkannya menjadi visi. Visi adalah terjemahan dari sebuah cita-cita menjadi gambaran jangka panjang yang jelas dan mampu menumbuhkan suatu komitmen yang kuat serta motivasi dan arah untuk bertindak.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2021-2026 Bab IV Pasal 4, sudah termuat dengan jelas cita-cita dari masyarakat Desa Hilisataro Nandisa yakni: “ Dengan perubahan dan semangat bersama kita wujudkan pembangunan desa yang merata di segala bidang, dan Desa Hilisataro Nandisa sebagai Desa Wisata andalan yang sejahtera (Bersih, Produktif, Edukatif, Sehat,Aman dan Nyaman)”.

Dari visi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Hilisataro Nandisa mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan secara sosial, ekonomi dan juga menumbuhkan kemandirian desa dengan menjadikan desa mereka sebagai desa wisata. Salah satu hal sederhana yang mendukung visi tersebut adalah masyarakat dengan sadar dan secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengelola objek wisata Gumbu Park walaupun secara sangat sederhana sebab masyarakat belum diberikan pendampingan tentang bagaimana cara mengembangkan desa mereka menjadi layak disebut desa wisata sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementrian Pariwisata. Keterbatasan inilah yang menjadi tugas tersendiri bagi Pemerintah Daerah, dinas terkait, akademisi maupun *stakeholder* lainnya untuk membantu desa tersebut sesuai dengan kompetensinya mewujudkan visi desa mereka.

Directions of Community Future (Arah tindakan masyarakat)

Pada tahap ini masyarakat desa Hilisataro Nandisa cenderung melaksanakan ragam kegiatan pengelolaan objek wisata didasarkan pada keinginan bersama yakni saling bergotong-royong dalam membangun sarana dan prasarana sederhana di lokasi wisata seperti pembuatan ayunan membuat jembatan kayu dan kamar mandi umum. Jadi pengelolaan yang dilakukan lebih bersifat inisiatif bersama tanpa memahami visi dari pengembangan desa wisata.

Masyarakat hanya memahami bahwa jika objek wisata tersebut dikunjungi oleh wisatawan maka sedikit banyak akan menambah pemasukan secara finansial bagi masyarakat di desa tersebut. Jadi arah tindakan yang dibangun berprinsip dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola

pariwisata. Secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, dan pengaturan promosi destinasi wisata. Namun peran pemerintah daerah dan dinas terkait belum dirasakan oleh masyarakat desa Hilisataro Nandisa baik melalui program pendampingan maupun sosialisasi tentang program desa wisata.

Designing Community Actions (Merancang Tindakan Masyarakat)

Pada tahap ini masyarakat merancang tindakan dengan menerjemahkan visi, tujuan dan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu rencana dengan struktur yang jelas dan logis. Selama proses perencanaan, masyarakat harus menggunakan sumberdaya internal di samping juga sumberdaya eksternal, misalnya yang berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Belum adanya ketentuan desa dalam pengelolaan desa menjadikan masyarakat bergerak karena inisiatif kelompok. Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa saat ini merasakan senang jika desa mereka dikunjungi tanpa memikirkan nilai uang yang diterima. Dengan kata lain, pemikiran masyarakat belum terbangun untuk mengkomersilkan atas potensi yang dimilikinya. Misalnya belum ada biaya retribusi masuk yang dibebankan kepada wisatawan yang mana seharusnya retribusi masuk dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan asli daerah selain itu pilihan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes juga tidak berhubungan dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai desa yang memiliki visi menjadi desa wisata seharusnya pembentukan BUMDes benar-benar untuk memaksimalkan potensi desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Jadi Desa Hilisataro Nandisa seharusnya dapat fokus dalam

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut baik itu potensi hasil perkebunan (durian, pinang) maupun potensi wisata alam (air terjun gumbu park) sehingga memiliki nilai jual atau diminati wisatawan sebagai suatu daya tarik yang unik dalam kehidupan pedesaan yang tidak ditemukan di daerah perkotaan.

Delivering Planned Activities (Melaksanakan Kegiatan).

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa belum adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan Desa Hilisataro Nandisa menuju desa wisata, sehingga masyarakat tidak memiliki acuan atau standar yang jelas dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Selain itu juga belum terdapat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di desa tersebut sehingga masyarakat desa hanya sekedar mengetahui bahwa desanya memiliki potensi wisata yang mampu mendatangkan wisatawan tapi mereka tidak memahami nilai dan penerapan dari sapta pesona.

Documenting Outputs, Outcomes and Learning (Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari).

Dalam tahap ini masyarakat melakukan refleksi terhadap “proses perjalanan” dan hasil yang telah dicapai. Refleksi dilakukan oleh kelompok masyarakat beserta semua pihak luar yang terlibat. Semangat masyarakat desa Hilisataro Nandisa untuk memajukan objek wisata Gumbu Park dan menjadi desa mereka menjadi desa wisata telah menghasilkan hal yang positif. Dimana masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut meskipun dalam konteks yang masih sangat sederhana. Seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Harita bahwa “Keterlibatan masyarakat desa ini dalam hal kerja bakti, membuat jembatan penyebrangan dari kayu, dan juga membuat ayunan.”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai desa yang memiliki keinginan untuk menjadi desa wisata maka diperlukan perhatian

khusus baik dari pemerintah daerah maupun dinas terkait untuk menjembatani pemerintah desa dan masyarakat mewujudkan keinginan mereka dimulai dengan melakukan perencanaan komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakatnya.

Model Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa Menuju Desa Wisata Berbasis Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

Perencanaan komunikasi pada dasarnya adalah perencanaan yang bersifat operasional, karena menyangkut pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembuatan model perencanaan komunikasi dilakukan agar masyarakat dapat menemukan masalah dan kemudian solusi dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup dihari yang akan datang. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi maka masyarakat tidak akan menyadari tentang manfaat dari program yang ditawarkan oleh pemerintah.

Bupati Nias Selatan dalam peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa Nias Selatan fokus terhadap pengembangan kepariwisataan pada 4 aspek yakni destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Maka perencanaan komunikasi pariwisata yang dirancang harus disesuaikan dengan perda tersebut agar arah pengembangan pariwisata di desa Hilisataro Nandisa tetap berada pada misi pembangunan kepariwisataan daerah.

Berikut adalah model perencanaan komunikasi pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat desa menuju desa wisata berbasis *sustainable tourism development* yang dapat peneliti rekomendasikan :

Gambar 4. Model Perencanaan Komunikasi



Sumber: Olahan peneliti, 2022

Model ini merupakan hasil kajian yang mengadopsi model perencanaan komunikasi yang bersumber dari non komunikasi. Sebab pada awalnya masalah yang ada di desa Hilisataro Nandisa adalah masalah non-komunikasi yaitu pengembangan kepariwisataan namun untuk menyelesaikan masalah diatas maka bisa diselesaikan dengan terapi komunikasi. Berikut adalah penjabaran dari model diatas :

- A. **Pengumpulan Fakta :** Untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh desa maka pemerintah desa harus membuat rencana pembangunan desa. Desa Hilisataro Nandisa sebenarnya sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mana di dalam visi desa termuat gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2021-2026. Namun dalam strategi pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan desa tidak dijabarkan secara detail tentang strategi yang akan dilakukan pemerintah desa agar mampu mewujudkan visi tersebut sehingga perlu untuk dilakukan revisi agar

perjalanan pembangunan desa lebih fokus dan terarah.

B. Masalah Komunikasi : Tahap berikutnya adalah memetakan permasalahan yang ada di Desa Hilisataro Nandisa khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata menuju desa wisata. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, distribusi informasi yang tidak merata, regulasi dan kebijakan yang tidak dipahami masyarakat, SDM tidak kompeten dan penggunaan teknologi informasi yang kurang dioptimalkan. Permasalahan atau konflik muncul karena adanya perbedaan pendapat, pengetahuan, pemahaman dan lain sebagainya. Hal ini dapat diatasi dengan terapi komunikasi dan juga dengan pendampingan dari dinas terkait.

C. Penetapan Strategi Komunikasi. Tahap berikutnya adalah penetapan strategi komunikasi erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis dan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Hilisataro Nandisa terkait dengan pengembangan desa menuju desa wisata maka perlu ditetapkan strategi komunikasi yang tepat, seperti penentuan sumber yang akan menjadi komunikator, penentuan isi

pesan yang akan disampaikan, penentuan saluran media yang digunakan, penentuan sasaran (komunikatif) dan menentukan efek apa yang diharapkan oleh pemerintah desa kedepannya.

D. Perencanaan Komunikasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahap ini perencanaan komunikasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat mulai dilakukan dengan terlebih dahulu merencanakan kegiatan komunikasi pariwisata apa yang sesuai dengan visi dan misi desa. Hal ini dilakukan agar arah pembangunan desa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka direncanakanlah beberapa kegiatan komunikasi pariwisata untuk memberdayakan masyarakat desa seperti penyuluhan tentang desa wisata, pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis), pendampingan masyarakat desa untuk mengelola homestay dan pendampingan masyarakat untuk menemukan UMKM khas desa Hilisataro Nandisa.

E. Implementasi Berdasarkan Regulasi merupakan tahap selanjutnya dari model perencanaan komunikasi yang diusulkan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada strategi itu sendiri. Dari beberapa

usulan kegiatan yang ditawarkan, untuk implementasinya tergantung dari bagaimana pemerintah desa menyikapi dan menyetujuinya. Jika tidak setuju maka perencanaan kegiatan komunikasi harus dilakukan audit komunikasi dan disesuaikan kembali dengan yang tujuan yang diharapkan. Namun jika setuju maka dapat dilaksanakan dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

- F. **Audit komunikasi** merupakan tahapan terakhir dari model perencanaan komunikasi pariwisata. Perencanaan komunikasi pariwisata yang sudah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan akan dilakukan audit komunikasi untuk menemukan apakah program komunikasi berjalan dengan baik, mendiagnosis hambatan atau permasalahan yang terjadi, memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional dan lainnya. Hasilnya audit komunikasi akan di bawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas masalah dan solusi serta tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa kedepan.

5. SIMPULAN

- a. Model perencanaan komunikasi pariwisata yang dirancang harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nias Selatan Tahun 2017-2025 agar arah pengembangan pariwisata di desa

Hilisataro Nandisa menuju desa wisata tetap berada pada misi pembangunan kepariwisataan daerah dan sesuai dengan visi serta misi desa.

- b. Pemetaan masalah dan solusi atas permasalahan yang ditemukan di Desa Hilisataro Nandisa khususnya terkait dengan komunikasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat desa dapat diselesaikan dengan terapi komunikasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2015. Komunikasi Pariwisata: Pemasaran dan Brand Destinasi. Prenadamedia :Jakarta
- Adiyoso, W. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : ITS Press
- Cangara, Hafied. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta : Raja Grafindo
- Dhamotharan, M. (2009). Handbook on integrated community development: Seven D approach to community capacity development. Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization.
- Huraerah, Abu, Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora, 2008
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Piagam Pariwisata Berkelanjutan tahun 1995.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2025
- Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Nias Selatan.
- Peraturan Desa Hilisataro Nandisa Nomor 06 tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2021-2026.
Keputusan Bupati Nias Selatan nomor
4.16_105 Tahun 2021 Tentang
Penetapan Desa Wisata di
Kabupaten Nias Selatan.
Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian

Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya